

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut :

Judul : UPAYA PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR DALAM MENANGANI
REHABILITASI DAN RESTORASI HUTAN
GAMBUT STUDI KASUS PROGRAM FCPF-CF
DI DESA MUARA SIRAN KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA 2022-2024

Pengarang : Abdurrahman

NIM 1902046035

Program Studi : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Hubungan Internasional Fisip Unmul.

Samarinda, 24 Juni 2026

Pembimbing



Dr. Sonny Sudiar, S.IP., M.Si

19750331 200501 1 002

UPAYA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENANGANI REHABILITASI DAN RESTORASI HUTAN GAMBUT STUDI KASUS PROGRAM FCPF-CF DI DESA MUARA SIRAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2022-2024

Abdurrahman¹, Sonny Sudiar²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Abstrak

Abdurrahman, 1902046035, dengan judul "Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Menangani Rehabilitasi dan Restorasi Hutan Gambut Studi Kasus Program FCPF-CF di Desa Muara Siran Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2024", dibimbing oleh Dr.Sonny Sudiar, S.IP., M.A, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan teori paradiplomasi menurut Alexander Kuznetsovfokuska. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan kombinasi kebijakan tata kelola lahan, rehabilitasi hidrologi melalui sekat kanal dan pengendalian drainase, restorasi vegetasi, serta program pemberdayaan masyarakat. Intervensi *Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund* (FCPF-CF) terbukti memberikan dampak positif pada peningkatan kondisi hidrologi gambut, peningkatan tutupan vegetasi restoratif pada area prioritas, peningkatan kesadaran partisipasi komunitas lokal, serta keberhasilan mewujudkan nihil kebakaran hutan dan lahan sejak tahun 2015. Meskipun demikian, efektivitas program ini masih terbatas oleh kendala pendanaan berkelanjutan, celah kapasitas teknis pelaksana di daerah, konflik kepemilikan lahan, serta tekanan dari aktivitas perluasan pertanian.

Kata kunci: rehabilitasi gambut, restorasi ekosistem, FCPF-CF, kebijakan provinsi, Muara Siran, Kutai Kartanegara.

Abstract

Abdurrahman, 1902046035, under the title "Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Menangani Rehabilitasi dan Restorasi Hutan Gambut Studi Kasus Program FCPF-CF di Desa Muara Siran Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2024" (*The Efforts of East Kalimantan Provincial Government in Managing Peatland Forest Rehabilitation and Restoration: A Case Study of the FCPF-CF Program in Muara Siran Village, Kutai Kartanegara Regency 2022-2024*). Supervised by Dr. Sonny Sudiar, S.IP., M.A., International Relations Study Program, Mulawarman University. This research is a qualitative study utilizing a descriptive approach. The data used in this study are secondary data obtained through library research. The data analysis technique employed is qualitative data analysis applying the theory of paradiplomacy by Alexander Kuznetsov. The results indicate that the East Kalimantan Provincial Government implemented a combination of land governance policies, hydrological rehabilitation through canal blocking and drainage control, vegetation restoration, and community empowerment programs. The Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) interventions significantly contributed to improved peat hydrology, increased restorative vegetation cover in priority areas, enhanced local community awareness and

participation, and successfully achieving zero forest and land fire incidents since 2015. However, program effectiveness was constrained by limited sustainable financing, local technical capacity gaps, land tenure conflicts, and pressures from agricultural expansion.

Keywords: peatland rehabilitation, ecosystem restoration, FCPF-CF, provincial policy, Muara Siran, Kutai Kartanegara.

1. PENDAHULUAN

Melalui pendekatan paradiplomasi lingkungan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkolaborasi dengan aktor internasional dalam program *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF) periode 2022–2024 untuk mengatasi kesenjangan antara regulasi kelestarian gambut (*das sollen*) dan realitas deforestasi akibat aktivitas antropogenik di Desa Muara Siran (*das sein*). Meskipun menghadapi tantangan berupa degradasi lahan, konflik kepemilikan, dan keterbatasan kapasitas tata kelola, program ini mengintegrasikan solusi teknis seperti restorasi hidrologi dengan solusi non-teknis melalui *Benefit Sharing Mechanism* (BSM) untuk mendanai penguatan kelembagaan desa, ekowisata Danau Siran, dan mata pencaharian ramah lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan rehabilitasi dan restorasi hutan gambut di Desa Muara Siran melalui implementasi skema insentif global tersebut.

2. METODE

Jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan serta menggambarkan kondisi yang terdapat pada permasalahan yang di ajukan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di dapat melalui buku, jurnal, rilis pemerintah dan artikel yang dapat di akses melalui media internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian penulis. Adapun teknik analisis data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

3. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Menangani Rehabilitasi dan Restorasi Hutan Gambut Studi Kasus Program FCPF-CF di Desa Muara Siran Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2024

Program *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF) periode 2022–2024 di Desa Muara Siran secara konkret menunjukkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengoperasionalisasikan komitmen iklim global ke dalam kebijakan lokal yang menyentuh tingkat tapak. Keberhasilan tata kelola ini bertumpu pada efisiensi penyaluran dana insentif *Result Based Payment* (RBP) dari Bank Dunia sebesar Rp313 miliar yang dikelola oleh pemerintah provinsi untuk memecahkan masalah keterbatasan fiskal daerah dalam mendanai program konservasi yang padat modal. Melalui birokrasi subnasional, dana tersebut disalurkan secara transparan dengan melibatkan organisasi non-pemerintah seperti YKAN dan Bioma untuk memberikan bimbingan teknis, yang kemudian diwujudkan ke dalam tiga pilar intervensi utama, yaitu pemulihan hidrologi, penguatan legalitas lembaga adat, serta insentif usaha makmur desa.

Pemecahan masalah ekologis di hutan gambut dalam Desa Muara Siran berhasil dicapai berkat adanya sinkronisasi antara intervensi fisik di lapangan dengan pemulihan ekonomi masyarakat sekitar. Secara teknis, masalah kekeringan lahan dan kerawanan kebakaran diatasi melalui pembasahan kembali (*rewetting*) gambut dengan membangun sekat kanal (*canal blocking*) serta penanaman vegetasi asli. Langkah teknis ini menjadi efektif karena didukung oleh pendekatan non-teknis berupa pengalokasian dana *Benefit Sharing Mechanism* (BSM) untuk memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam mengelola potensi ekowisata Danau Siran serta budidaya sarang burung walet yang ramah lingkungan.

Secara teoretis, temuan konkret dari efektivitas program FCPF-CF di Desa Muara Siran ini memberikan kontribusi kebaruan ilmiah (*novelty*) berupa modifikasi terhadap Teori Paradiplomasi Lingkungan dari Alexander Kuznetsov. Teori konvensional umumnya berasumsi bahwa diplomasi lingkungan oleh pemerintah daerah sering kali mandul dan mengalami kegagalan akibat keterbatasan kapasitas teknis aparat, ego sektoral, serta bayang-bayang kontrol ketat pemerintah pusat. Namun, studi kasus ini berhasil memodifikasi keterbatasan asumsi tersebut dengan

melahirkan varian konseptual baru yang disebut sebagai "Paradiplomasi Lingkungan Berbasis Tapak Terintegrasi" (*Site-Based Integrated Environmental Paradiplomacy*).

Modifikasi teori ini menawarkan proposisi baru bahwa paradiplomasi tidak akan terjebak menjadi sekadar formalitas dokumen di atas kertas apabila pemerintah daerah mampu bertindak sebagai *intermediary* (perantara) aktif yang menghubungkan instrumen pendanaan global langsung dengan struktur ekonomi insentif masyarakat di tingkat desa terluar. Dengan payung hukum regulasi lokal yang kuat dan pembagian porsi insentif yang menyentuh tingkat tapak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuktikan bahwa keterbatasan kapasitas aparat di daerah dapat dieliminasi melalui kemitraan strategis bersama *Non Government Organization* (NGO) lingkungan, sehingga paradiplomasi berubah menjadi instrumen fungsional yang tangguh dalam memecahkan krisis iklim global secara nyata di tingkat lokal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan rehabilitasi dan restorasi hutan gambut di Desa Muara Siran melalui implementasi program *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF) periode 2022–2024 telah berjalan secara efektif dan berhasil mencapai tujuan yang dicanangkan. Sinkronisasi antara regulasi kelestarian (*das sollen*) dan realitas lapangan (*das sein*) dapat dijumpai melalui kombinasi intervensi multidimensi yang seimbang.

Secara teknis-ekologis, masalah kekeringan lahan dan ancaman kebakaran hutan gambut dalam berhasil diatasi melalui restorasi hidrologi berupa pembangunan sekat kanal yang sukses menekan angka titik api (*hotspot*) hingga mencapai nol persen. Keberhasilan teknis ini menjadi berkelanjutan karena didukung oleh intervensi non-teknis berupa penyaluran dana insentif *Benefit Sharing Mechanism* (BSM) berbasis kinerja dari Bank Dunia yang dialokasikan langsung untuk memberdayakan kelembagaan desa, mengembangkan ekowisata Danau Siran, serta memfasilitasi mata pencaharian ramah lingkungan seperti budidaya walet tanpa bakar. Pendekatan ini terbukti secara logis mampu mengalihkan

ketergantungan ekonomi masyarakat dari sektor ekstraktif yang merusak hutan ke sektor jasa lingkungan yang lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Ivan dan Natalia Cuglesan, *Multi-Level Governance And Decentralization In The Unitary States Of The European Union. Case Study: France And Romania, NEJ - Vol. 14 - n. 1 - p. 47-59 / jan-abr 2009, Hal: 48*
- Alexander S. Kuznetsov. 2015. *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments In International Affairs*. New York: Routledge
- Andoh, J., Oduro, K. A., Park, J., & Lee, Y. (2022). Towards REDD+ implementation: Deforestation and forest degradation drivers, REDD+ financing, and readiness activities in participant countries. *Frontiers in Forests and Global Change*, 5. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2022.957550>
- Aryani, Riza, 2012. *Analisa Kegagalan Implementasi Reducing Emission From Deforestation And Forest Degradation Plus (REDD+) Dalam Proyek Rimba Raya Di Kalimantan tengah (2008-2010)*. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Ayuningtyas, Defvy. 2022. “*Degradasi dan Deforestasi Hutan di Daerah Kalimantan Timur*” Vol. 1. No. 1. Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin
- Buzan, B. W. (1998). *Security: A New Framework For Analysis*. Colorado: Lynner Rienner Publishers Inc.
- Burchill, Scott. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. Palgrave.
- Bioma Foundation. (2023). *Laporan Tahunan Program Pengurangan Emisi di Desa Muara Siran*. Samarinda: Yayasan Bioma.
- Baldata Agnia Majid, Ika Riswanti Putranti, Muhammad Faizal Alfian, 2022, *Kebijakan 13th Five Year Plan Tiongkok Sebagai Implementasi Paris Agreement Tahun 2016-2020*. *Journal of International Relations*, Volume 8, Nomor 4, 2022, hal 972-984. Universitas Diponegoro
- BPDLH. (2023). *Laporan Implementasi Pembayaran Berbasis Hasil FCPF-CF Kalimantan Timur*. Jakarta: Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. (2022). *Dokumen Pelaksanaan Program FCPF-CF Kalimantan Timur*. Samarinda.
- Fariani, M. (2021). *Implementasi Kerjasama Indonesia Dengan Deforestasi Dan Degradasi Hutan Di Indonesia Melalui Framework Redd + Periode 2015-2020*. Tesis (pp. 1–121)
- Forest Carbon Partnership, 2019, *Indonesia’s Large-scale Emission Reductions Program Gets Ready for Implementation*.
- Hana, Triani, 2023. *Indonesia’s Carbon Trading*. Alaka Strategic
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press
- Kementerian Lingkungan Hidup, 2021, *Menteri LHK: Kepentingan Nasional Menuju Netral Karbon 2060 Tanggung Jawab Bersama*.

-
- Mohtar Mas'oe'd, 1949-. (1990). *Ilmu hubungan internasional : disiplin dan metodologi*. Mohtar Mas'oe'd. Jakarta :: LP3ES.
- Margareth, Rossi. 2022. Perdagangan Karbon: Memahami Konsep dan Implementasinya. Jurnal Vol. 1 No. 3. Pusat Standardisasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.
- Mazmanian, Daniel A. & Sabatier, Paul A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman Publishers.
- Nahdian, Berry. 2009. *Pemanasan Global, Skema Global dan Implikasinya bagi Indonesia* Vol.6 No.1. Jurnal Legislasi Indonesia diakses
- Novrianto, Dimas Wicaksono. Efektivitas Penerapan Mekanisme Carbon Trading di Indonesia Hasil Ratifikasi United Nations Framework Conventions on Climate Change, Conference of Parties 21, Paris Agreement Tahun 2014
- Ongaro, E. (2020, June 30). Multi-Level Governance and Public Administration. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*.
- Padelford, N. J. (1949). *Review of Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace.*, by H. J. Morgenthau. *Political Science Quarterly*, 64(2), 290–292.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2023, DANA KARBON UNTUK KALTIM CAIR RP69 MILIAR.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2020. Menuju Implementasi Pembayaran Penurunan Emisi Karbon FCPF-CF.
- Peneliti LPPM Unila. (2019). Pemetaan Strategis Potensi Provinsi Lampung Dalam Rangka Menghadapi IMTGT Repository LPPM Universitas Lampung.
- Wibowo Agung, 2019, Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan. Koalisi Tanahkita.id.
- Prihatiningtyas, Wilda, 2023, Perspektif Keadilan Dalam Kebijakan Perdagangan Karbon (*Carbon Trading*) di Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim. Jurnal Vol. 7 No. 2. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Tek Narayan Maraseni, Bishnu Hari Poudyal, Eak Rana, Sudarshan Chandra Khanal, Puspa Lal Ghimire, Bhishma P. Subedi, Mapping national REDD+ initiatives in the Asia-Pacific region, *Journal of Environmental Management*, Volume 269, 2020,
- Tien Wahyuni , Rita Diana , Niel Makinuddin , & Bagus Nouval. 2019. *INISIATIF-INISIATIF PROGRAM YANG DIKEMBANGKAN DALAM UPAYA IMPLEMENTASI REDD+ DI KALIMANTAN TIMUR (Program Initiatives Developed in REDD+ Implementation Efforts in East Kalimantan)*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 16 No.2, November 2019 : 145-160. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa
- Wahyu, Shinta Purnama. 2022. Perdagangan Karbon Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia, Universitas Lampung.
- World Bank. (2021). *Indonesia: Emission Reductions Program Document (ERPD) for the FCPF Carbon Fund*. Washington, DC: Forest Carbon Partnership Facility.
- UNFCCC, *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change*.

Yayasan Konservasi Alam Indonesia, 2022, *COP 27: Pembelajaran dari Program FCPF-CF Kalimantan Timur*. Dapat diakses di

Perdinan, P. (2021). *Perubahan Iklim dan Demokrasi: Ketersediaan dan Akses Informasi Iklim, Peranan Pemerintah, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Implementasi Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia*. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1), 109–132.

Pratama, Yoga. 2015, “*Dampak Negatif Penggunaan Energi Fosil Dari Sektor Transportasi dan Industri*”